

BAB VI

PENUTUP

VI.1. Kesimpulan

Dari penelitian tentang determinan jumlah permintaan minyak tanah di 30 propinsi di Indonesia pada tahun 2004, serta perbandingan perhitungan jumlah permintaan minyak tanah pada tahun 2008 dengan asumsi ceteris paribus atau tidak ada kebijakan konversi yang didapat dari hasil regresi tahun 2004 dan perhitungan jumlah permintaan minyak tanah pada kenyataannya tahun 2008 yaitu setelah konversi minyak tanah ke LPG berlangsung, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan pada jumlah permintaan minyak tanah (K_t) yaitu harga minyak tanah itu sendiri (P_{Kt}), pendapatan per kapita (Y/cap) dan jumlah permintaan minyak tanah pada tahun sebelumnya (K_{t-1}) yang merupakan proxy bagi kemajuan teknologi saat itu. Dari hasil regresi tersebut, variabel pendapatan per kapita dan permintaan minyak tanah pada tahun sebelumnya menunjukkan arah positif, yang berarti kenaikan dari variabel-variabel tersebut menyebabkan meningkatnya jumlah permintaan minyak tanah dan sebaliknya variabel harga minyak tanah menunjukkan arah negatif, yang berarti kenaikan variabel tersebut, menyebabkan penurunan jumlah permintaan minyak tanah. Hubungan variabel-variabel tersebut sesuai dengan hipotesis penelitian. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a) Harga LPG bukan faktor penentu bagi jumlah permintaan minyak tanah hal ini dikarenakan LPG bukan sebagai barang substitusi bagi minyak tanah. Jika data

mengenai segmen masyarakat pengguna LPG mungkin penelitian ini dapat dikaji lebih dalam. Pada umumnya, di Indonesia segmen pengguna LPG sangatlah kecil, sehingga variabel harga LPG tidak signifikan. LPG bukan barang substitusi minyak tanah pada masyarakat golongan miskin yang merupakan golongan masyarakat terbesar di Indonesia. Barang substitusi untuk minyak tanah pada golongan miskin adalah kayu bakar, dan data tentang kayu bakar sulit didapat.

b) Listrik juga tidak dapat digunakan sebagai barang substitusi untuk minyak tanah dalam hal memenuhi kebutuhan penerangan. Hal ini dikarenakan jika listrik sudah tersedia, masyarakat akan meninggalkan minyak tanah.

2. Berdasarkan kenyataan jumlah permintaan minyak tanah saat ini tahun 2008, yaitu tahun setelah konversi berjalan, jumlah permintaan minyak tanah menurun jika dibandingkan dengan hasil regresi tahun 2008 dengan asumsi ceteris paribus atau tidak ada konversi minyak tanah ke LPG. Jumlah permintaan minyak tanah saat ini sebesar 185,47 liter dan jumlah permintaan berdasarkan hasil regresi tahun 2008 dengan asumsi ceteris paribus sebesar 414,31 liter, berarti permintaan minyak tanah turun lebih dari 50%. Dengan kata lain program pemerintah mengenai konversi minyak tanah ke LPG berhasil sampai saat ini yaitu Juli 2008. Jika pemerintah tidak waspada terhadap kendala-kendala yang muncul sebagai imbas dari kebijakan konversi ini, dapat menimbulkan masalah baru. Kendala tersebut adalah kelangkaan minyak tanah yang terjadi di masyarakat sehingga memicu rush atau panic buying oleh masyarakat untuk membeli minyak tanah dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini terjadi karena pemerintah perlahan-lahan mengurangi pasokan minyak tanah, sehingga masyarakat berlomba-lomba membeli minyak tanah. Selain itu, jalur distribusi barang substitusi

minyak tanah yaitu LPG belum berjalan lancar, sehingga masyarakat sulit mengakses LPG. Walaupun sampai saat ini kebijakan konversi minyak tanah ke LPG berhasil, pemerintah tetap harus waspada agar target kebijakan ini akan tercapai di tahun 2012.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah :

- a) Program konversi yang dijalankan sekarang, dapat merubah mind set di masyarakat dalam kebiasaan memasak, bila diikuti dengan kebijakan menarik jumlah permintaan minyak tanah yang dijual di pasaran.
 - b) Pada program konversi ini, pemerintah melakukan pendekatan “by force” atau secara paksa dalam menjalankan konversi minyak tanah ke LPG.
 - c) Penggunaan LPG sebenarnya sangat mahal, harga LPG semakin meningkat karena jumlah permintaannya yang tinggi, akibat program konversi minyak tanah ke LPG yang dijalankan dengan paksaan oleh pemerintah, sehingga masyarakatpun terpaksa mengkonsumsi LPG, yang menyebabkan jumlah permintaan akan LPG meningkat. Selain itu pengguna LPG harus menyediakan sarana LPG yaitu kompor gas, tabung, klep, selang dan lain-lain. Pemerintah juga harus memperhatikan prasarannya yaitu agen, tempat penjualan, jalur distribusi dan lain-lain, yang biayanya tidaklah sedikit.
3. Pada kenyataannya, di tahun 2008 perkiraan penghematan yang akan dicapai pemerintah hanya sebesar Rp.4,98 Triliun/tahun dengan asumsi infrastruktur telah terbangun secara sempurna, atau hanya 50% dari target pemerintah di awal tahun kebijakan konversi dijalankan sebesar Rp.10,81 Triliun/tahun dengan asumsi infrastruktur telah terbangun secara sempurna. Dengan kata lain, penghematan APBN yang dilakukan dengan program kebijakan konversi minyak tanah ke LPG tidak berjalan mulus sesuai target pemerintah.

VI.2. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, saran yang diajukan oleh penulis adalah :

1. Pemerintah harus memperhatikan kendala-kendala yang muncul selama kebijakan konversi berlangsung agar tidak menjadi masalah baru. Salah satunya adalah pemerintah harus lebih memperhatikan jalur distribusi LPG di setiap propinsi agar masyarakat dapat mengakses LPG dengan mudah, kemudian meningkatkan mutu dan kualitas aksesoris serta tabung LPG agar tidak membahayakan pengguna LPG. Selain itu pemerintah juga harus melakukan penyuluhan-penyuluhan terhadap masyarakat terutama masyarakat golongan bawah secara personal dan impersonal, dengan itu akan mempermudah merubah kebiasaan masyarakat untuk beralih dengan mengkonsumsi LPG, sehingga jumlah permintaan minyak tanah akan menurun terus dan perlahan-lahan kebijakan pemerintah mengenai konversi minyak tanah ke LPG akan berhasil sesuai target pemerintah pada tahun 2012.
2. Pemerintah terlalu terburu-buru untuk membuat kebijakan dengan persiapan yang relatif minim, sehingga dampak-dampak negatif yang menyebabkan masalah baru timbul setelah kebijakan konversi tersebut dijalankan. Selain itu, pemerintah tidak mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat krisis global, seperti krisis minyak dunia, dan krisis pangan global, yang berdampak buruk pada perekonomian Indonesia.
3. Penelitian ini memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah keterbatasan data dan keterbatasan waktu penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini akan jauh lebih sempurna jika data dan variabel yang digunakan lebih banyak, misalnya dengan menggunakan panel data tahun 2004, 2005 dan 2006, selain itu variabel yang diteliti juga lebih luas seperti batubara, arang dan biogas, sehingga penelitian ini dapat dikaji lebih dalam